

BAB V

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Target-target sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun sampai dengan 2021 membutuhkan komitmen dari seluruh perangkat daerah dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Keselarasan rencana operasional seluruh perangkat daerah dalam hal ini Renstra-PD dengan RPJMD untuk mencapai target pembangunan provinsi, menjadi hal yang mutlak. Demikian juga dengan dukungan dari kabupaten/kota terhadap target pembangunan provinsi dalam bentuk penetapan target indikator makro pembangunan di daerah masing-masing.

Untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019, maka sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 telah ditetapkan target beberapa indikator kinerja makro daerah bagi seluruh kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Utara. Berikut ini disajikan realisasi dan target indikator kinerja makro 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019. Target indikator kinerja dimaksud disajikan pada Gambar 5.1

Selain target pembangunan kabupaten/kota yang mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, pada bab ini disajikan juga arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Arah pembangunan kewilayahan tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037.

Tabel 5.1
Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

NO	INDIKATOR KINERJA	2016	2017		2018	2019
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)					
1.1	Kabupaten Bulungan	2,40	4,24		4,07	3,91
1.2	Kabupaten Malinau		7,77		7,86	8,95
1.3	Kabupaten Nunukan		1,63		2,72	3,82
1.4	Kabupaten Tana Tidung	6,00	7		7,5	8
1.5	Kota Tarakan	7,08	7,16		7,22	7,28
	Provinsi Kalimantan Utara	3,75	6,21	6,62	6,76	7,37
2	TINGKAT KEMISKINAN (%)					
1.1	Kabupaten Bulungan	12,03	10,9		8,55	7,12
1.2	Kabupaten Malinau	9,45-9,46	9,08-9,10		8,73-8,76	8,39-8,43
1.3	Kabupaten Nunukan	8	7,5		7	6,5
1.4	Kabupaten Tana Tidung	9,0-9,5	8,5-9,0		8,0-8,5	7,0-8,0
1.5	Kota Tarakan	7,23	6,81		6,61	6,5
	Provinsi Kalimantan Utara	6,99	6,29	6,96	5,66	5,10
3	TINGKAT PENGANGGURAN (%)					
1.1	Kabupaten Bulungan	9,5	8,4		7,3	6,2
1.2	Kabupaten Malinau	8,24	7,89		7,53	7,16
1.3	Kabupaten Nunukan	3,78	3,5		3,2	3
1.4	Kabupaten Tana Tidung	5,25	5		4,75	4,5

Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	2016	2017		2018	2019
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1.5	Kota Tarakan	7,49	7,00		6,89	6,78
	Provinsi Kalimantan Utara	5,23	5,02	5,54	4,82	4,63
4	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)					
1.1	Kabupaten Bulungan	69,88	74.064		74.298	74.532
1.2	Kabupaten Malinau	70,71	70,5		70,67	70,85
1.3	Kabupaten Nunukan	64,35	65,3		66,5	67,5
1.4	Kabupaten Tana Tidung	65,64	75,5		76	76,5
1.5	Kota Tarakan	74,88	78,49		78.72	79.02
	Provinsi Kalimantan Utara	69,20	69,61		70,02	70,43
5	INDEKS GINI					
1.1	Kabupaten Bulungan	0,34	0,326		0,312	0,298
1.2	Kabupaten Malinau	0,3	0,3		0,3	0,3
1.3	Kabupaten Nunukan		0,3		0,3	0,3
1.4	Kabupaten Tana Tidung	0,21-0,30	0.18-0.27		0.15-0.24	0.12-0.21
1.5	Kota Tarakan	0,2463	0,2309		0,2154	0,2000
	Provinsi Kalimantan Utara	0,3	0,3	0,313	0,3	0,29

Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Berdasarkan dokumen Materi Teknis RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2035, konsep pengembangan wilayah di provinsi ini diarahkan sebagai kawasan *frontier* sesuai karakter kawasan. Sebagian wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan merupakan kawasan *Heart of Borneo* yang berfungsi lindung, dengan jumlah penduduk yang sedikit yang menyebar.

Pusat kegiatan perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Pusat Kegiatan Perkotaan

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
1.	PKN Tarakan	<ul style="list-style-type: none">▪ simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;▪ simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi;▪ pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;▪ industri pengolahan lanjut kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;▪ pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan; dan▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
2.	PKW Tanjung Selor	<ul style="list-style-type: none">▪ pusat pemerintahan provinsi;▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;▪ pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;▪ pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan; dan▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
3.	PKW Nunukan	<ul style="list-style-type: none">▪ pusat pemerintahan kabupaten;▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan menghubungkan wilayah sekitarnya;▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;▪ pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya;

Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabean, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan ▪ pusat promosi investasi dan pemasaran.
4.	PKW Tau Lumbis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan di perbatasan; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan menghubungkan wilayah sekitarnya; ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya; ▪ pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabean, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan ▪ pusat promosi investasi dan pemasaran.
5.	PKW Malinau Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kabupaten; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; ▪ pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
6.	PKW Tidung Pale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kabupaten; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; ▪ pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; ▪ pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
7.	PKWp Sungai Nyamuk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kabupaten; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala regional; ▪ pintu gerbang internasional; ▪ pusat kegiatan pendidikan; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata;
8.	PKL Salimbatu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat industri rumah tangga dan kerajinan; dan ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
9.	PKL Bunyu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat pertambangan batubara, minyak bumi dan gas alam) sub wilayah Bunyu; dan ▪ pusat kegiatan penunjang pariwisata.

Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
10.	PKL Long Bia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat industri rumah tangga dan kerajinan; dan ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
11.	PKL Karang Agung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat industri pengolahan pertanian, perkebunan, dan pertambangan ramah lingkungan; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian dan perkebunan.
12.	PKL Sekatak Buji	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; dan ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
13.	PKL Tanah Kuning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat industri pengolahan hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian (agropolitan dan agroindustri).
14.	PKL Long Bawan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala regional; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; ▪ pusat kegiatan pendidikan; ▪ pusat kegiatan konservasi; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
15.	PKL Long Layu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; ▪ pusat kegiatan konservasi; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
16.	PKL Mensalong	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
17.	PKL Pembeliangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
18.	PKL Atap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
19.	PKL Tulin Onsoi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
20.	PKL Krayan Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
21.	PKL Krayan Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
22.	PKL Krayan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan;

Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
	Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
23.	PKL Krayan Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
24.	PKL Krayan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat kegiatan industri; dan ▪ pusat kegiatan pendidikan.
25.	PKL Data Dian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian dan perkebunan.
26.	PKL Long Berang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian dan perkebunan.
27.	PKL Long Loreh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian dan perkebunan.
28.	PKL Long Pujungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan; dan ▪ pusat pemerintahan kecamatan.
29.	PKL Mahak Baru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan.
30.	PKL Long Ampung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan; dan ▪ pusat pemerintahan kecamatan.
31.	PKL Long Alango	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan; dan ▪ pusat pemerintahan kecamatan.
32.	PKL Pulau Sapi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan; dan ▪ pusat pemerintahan kecamatan.
33.	PKL Sesayap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal;

Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan; dan ▪ pusat pemerintahan kecamatan.
34.	PKL Tanah Merah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan ▪ pusat kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pariwisata, agroindustri dan pertambangan.
35.	PKL Rian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan; dan ▪ pusat pemerintahan kecamatan.
36.	PKL Bebatu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan; dan ▪ pusat pemerintahan kecamatan.
37.	PKL Buang Baru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat perdagangan dan jasa skala lokal; ▪ pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; ▪ pusat kegiatan pertanian tanaman pangan; dan ▪ pusat pemerintahan kecamatan.
38.	PKSN Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; ▪ pintu gerbang internasional; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan ▪ pusat pengembangan wisata budaya.
39.	PKSN Long Midang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; ▪ pintu gerbang internasional; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.
40.	PKSN Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; ▪ pintu gerbang internasional; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan ▪ pusat pengembangan wisata budaya.
41.	PKSN Tau Lumbis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat pemerintahan kecamatan; ▪ pusat kegiatan konservasi; ▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; ▪ pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; ▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya; dan ▪ pusat pelayanan penyangga di KSN Kawasan Perbatasan Negara
42.	PKSN Simangaris	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; ▪ pintu gerbang internasional; ▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan ▪ pusat pengembangan wisata budaya. ▪ pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan KSN Kawasan Perbatasan Negara
43.	PKSN Long	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

Bab V – Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

No.	Sistem Provinsi	Fungsi Pelayanan
	Nawang	<ul style="list-style-type: none">▪ pintu gerbang internasional;▪ simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.▪ pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan KSN Kawasan Perbatasan Negara
44.	PKSNp Apau Ping	<ul style="list-style-type: none">▪ pusat pemerintahan kecamatan;▪ pusat kegiatan konservasi;▪ simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;▪ pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;▪ pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya; dan▪ pusat pelayanan penyangga di KSN Kawasan Perbatasan Negara